

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat Kompetensi Sumber Daya Manusia di Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Penelitian di DPMD Kabupaten Cirebon menunjukkan tantangan signifikan dalam kompetensi SDM, terutama terkait ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan tugas di bidang akuntansi dan keuangan daerah. Meskipun hanya 13,79% pegawai yang memiliki pendidikan akuntansi, pegawai menunjukkan dedikasi tinggi melalui pelatihan dan pengembangan diri. Kompetensi SDM dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap, di mana integritas dan kemampuan beradaptasi sangat penting. Upaya pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan dorongan pimpinan untuk berinovasi diharapkan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

Implementasi SIPD di DPMD Kabupaten Cirebon telah membawa perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, namun masih menghadapi kendala, seperti pemahaman pegawai yang terbatas, masalah teknis, dan susah untuk diakses. Meskipun pelatihan internal telah dilakukan, masih diperlukan peningkatan pemahaman aplikasi dan koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya meliputi peningkatan kualitas pelatihan, sosialisasi secara langsung, serta perbaikan teknis, termasuk peningkatan kapasitas server dan penambahan fitur aplikasi. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan SIPD dapat berfungsi lebih optimal dan mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas SIPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di DPMD Kabupaten Cirebon

Secara keseluruhan, meskipun SIPD telah berhasil menyajikan data secara lebih terintegrasi dan mempermudah pelaporan, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa kendala teknis dan operasional. Faktor seperti kapasitas server yang tidak memadai, keterbatasan pelatihan, dan peralihan dari sistem sebelumnya menjadi tantangan yang harus diatasi. Meskipun demikian, sistem ini telah menunjukkan kemajuan dan pencapaian sasaran yang diinginkan, yakni transparansi, efisiensi waktu, dan pemantauan yang lebih mudah. Ke depan, dengan perbaikan infrastruktur dan peningkatan pelatihan, SIPD diharapkan dapat berfungsi lebih efektif dan efisien.

4. Kendala Utama Yang di Hadapi Dalam Implementasi SIPD di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dan Upaya Mengatasi Hal tersebut

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di DPMD Kabupaten Cirebon menghadapi berbagai kendala, terutama terkait performa sistem, kesulitan teknis, dan kapasitas sumber daya manusia. Kendala utama meliputi error pada server, ketidakstabilan aplikasi, dan lambatnya proses loading yang menghambat efisiensi kerja. Selain itu, kesalahan input data dan kurangnya pemahaman pegawai juga memperburuk situasi. Keterbatasan kapasitas server yang digunakan secara nasional juga memperlambat akses.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan implementasi SIPD dalam pengelolaan Keuangan daerah di DPMD Kota Cirebon sehingga lebih membawa dampak yang baik bagi pengelolaan keuangan. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Pimpinan perlu mendorong pegawai untuk berinovasi dan mengaplikasikan pengetahuan dari pelatihan dalam pekerjaan sehari-hari. Selain itu, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan berbagi pengetahuan akan memperkuat kompetensi SDM. Dengan langkah ini, pengelolaan keuangan daerah diharapkan menjadi lebih efektif, transparan, dan sesuai standar.
2. Diperlukan peningkatan pelatihan, sosialisasi langsung, serta perbaikan teknis seperti kapasitas server dan fitur aplikasi. Dengan langkah-langkah ini, SIPD diharapkan dapat berfungsi lebih optimal dan mendukung transparansi keuangan daerah.
3. Untuk meningkatkan efektivitas SIPD di DPMD Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan perbaikan kapasitas server, pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi pegawai, serta sosialisasi dan dukungan teknis yang kontinu. Selain itu, evaluasi dan pengembangan sistem secara berkala, termasuk penambahan fitur, diperlukan untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan SIPD dapat lebih efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.
4. Untuk mengatasi kendala dalam implementasi SIPD di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur teknologi, seperti pembaruan server yang lebih kuat dan stabil untuk mendukung kapasitas akses yang lebih besar. Selain itu, pelatihan rutin bagi pegawai tentang penggunaan sistem dan pentingnya akurasi data sangat diperlukan agar mereka dapat mengoperasikan aplikasi dengan lebih efektif. Kolaborasi dengan pihak penyedia layanan untuk memperbaiki bagus dan meningkatkan performa aplikasi juga menjadi langkah penting. Pemerintah daerah harus mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem yang lebih efisien, agar dapat mengurangi kendala teknis dan meningkatkan kinerja SIPD secara keseluruhan.